

RINGKASAN

Fatia Haura Shafana 210510344 **PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PADA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE)**
(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. dan Arif Rahman, S.H., M.H)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 56 tentang Cipta Kerja. UU ini bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan adaptif. Namun, di kota Lhokseumawe, masih terdapat kesenjangan signifikan antara ketentuan UU dan praktik dilapangan. Para pekerja di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah masih menghadapi ketidakpastian dalam perjanjian kerja, dengan syarat-syarat yang sering diabaikan oleh pengusaha. Selain itu, masalah pembayaran upah yang tidak tepat waktu dan gaji yang tidak sesuai dengan UMP dan UMK juga masih umum terjadi, bertentangan dengan prinsip perlindungan hak pekerja yang diharapkan oleh undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu pada sektor makanan dan minuman di kota Lhokseumawe serta mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu

Metode penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif, pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data lapangan yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah mengumpulkan informasi, data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema utama, memahami konteks hukum yang relevan, dan menggali wawasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan perjanjian kerja waktu tidak tertentu di Kota Lhokseumawe ditemukan, masih kurangnya hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemilik usaha untuk kesejahteraan karyawan yang masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Hambatannya yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman dari usaha-usaha tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terutama terkait pemberian hak BPJS dan pembayaran upah yang sesuai dengan ketentuan. sehingga posisi pemberi kerja dengan pekerja tidak seimbang. Upaya hukumnya yaitu lebih mengutamakan penyelesaian perselisihan masalah melalui cara *bipartite*. Disarankan kepada pelaku usaha dalam perjanjian kerja untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerja. Pemilik usaha cafe diharapkan memastikan keanggotaan BPJS yang terpenuhi dengan baik. Pemerintah khususnya Disnaker agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang menerapkan perjanjian kerja dengan cara melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja, karena tanpa adanya peran dari pemerintah hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Waktu Tidak Tertentu, Sektor Makanan dan Minuman.

ABSTRACT

Fatia Haura Shafana
210510344

**IMPLEMENTATION OF INDEFINITE TIME
WORK AGREEMENTS (PKWTT) IN THE
FOOD AND BEVERAGE SECTOR
(RESEARCH STUDY IN LHOKSEUMAWE
CITY**

**(Dr. Marlia Sastro, S.H., M.Hum. and Arif
Rahman, S.H., M.H)**

The Indefinite Term Employment Agreement (PKWTT) is regulated in Law Number 6 of 2023 Article 56 concerning Job Creation. This law aims to create a supportive and adaptive business environment. However, in the city of Lhokseumawe, there is still a significant gap between the provisions of the law and practices in the field. Workers in the Micro, Small, and Medium Enterprises sector still face uncertainty in their employment agreements, with terms and conditions often ignored by employers. In addition, issues such as late payment of wages and salaries that do not comply with the Regional Minimum Wage (UMP) and Municipal Minimum Wage (UMK) are still common, contrary to the principle of worker rights protection as expected by the law.

This study aims to determine the implementation of indefinite employment agreements in the food and beverage sector in the city of Lhokseumawe and to identify the obstacles and efforts faced in implementing indefinite employment agreements.

This research uses qualitative research, an empirical juridical approach with field data collection techniques, namely interviews, documentation, and literature. After collecting information, the data is analyzed qualitatively to identify the main themes, understand the relevant legal context, and explore in-depth insights into the phenomenon being studied, thus providing a comprehensive picture of the issues raised.

The results of the study show that the implementation of indefinite work agreements in Lhokseumawe City is still lacking in terms of the rights and obligations provided by business owners for the welfare of employees, which are still not in accordance with Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The obstacle is the lack of awareness and understanding among businesses about the rights and obligations that must be fulfilled, especially regarding the provision of BPJS rights and the payment of wages in accordance with the provisions, resulting in an imbalance between the position of employers and workers. The legal effort is to prioritize the resolution of disputes through bipartite means. It is recommended that business actors pay more attention to workers' rights in employment agreements. Cafe owners are expected to ensure that BPJS membership is properly fulfilled. The government, especially the Manpower Office, should provide guidance and supervision to businesses that implement employment agreements by educating and socializing with employers and workers, because without the role of the government, this will not run well.

Keywords: Employment Agreement, Indefinite Term, Food and Beverage Sector.